

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Pemerintah Daerah.....	6
2. Pendapatan Daerah	7
3. Pajak Daerah.....	7

4.	Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
5.	Retribusi Daerah	10
F.	Metode Penelitian	12
1.	Objek Penelitian.....	12
2.	Subjek Penelitian	12
3.	Sumber Data	13
4.	Metode Pendekatan.....	14
5.	Analisis Data.....	14
6.	Kerangka Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI		16
A.	Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	16
1.	Pengertian Pemerintah Daerah	16
2.	Dasar Hukum	18
3.	Pembagian Daerah dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	19
4.	Otonomi Daerah.....	20
5.	Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	23
B.	Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah	24
1.	Pengertian Pendapatan Daerah	25
2.	Sumber-sumber Penerimaan Daerah	26
C.	Tinjauan Tentang Pajak Daerah.....	28
1.	Jenis-jenis Pajak Daerah	31
2.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah	32
D.	Pajak Kendaraan Bermotor.....	33
1.	Subjek Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	34
2.	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	35

3.	Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	36
4.	Masa Berlaku Pajak Kendaraan Bermotor	38
E.	Retribusi Daerah	38
1.	Pengertian Retribusi Daerah.....	39
2.	Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	41
3.	Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah	42
4.	Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43
5.	Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	44
F.	Tinjauan Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor.....	47
1.	Pengertian Retribusi Kendaraan Bermotor.....	47
2.	Obyek Retribusi Kendaraan Bermotor	48
3.	Subyek Retribusi Kendaraan Bermotor	48
G.	Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	49
1.	Beberapa Permasalahan Signifikan Peraturan Daerah.....	49
2.	Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.....	51
H.	Pengertian Mobil Barang dan Ambulans.....	54

BAB III IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL 57

A.	Prosedur syarat merubah Mobil Biasa menjadi Mobil Ambulans di Kabupaten Bantul	57
B.	Akibat hukum dari persetujuan perubahan status mobil barang menjadi mobil ambulans di Kabupaten Bantul.	75

BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80

